Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH BANI SALJUK

[1]**Rizka Damayanti,** [2]**Nurul Anggi Alfya Sulhajri,** [3]**Mukhtar Lutfi**
[1,2,3]Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: [1]rizkadamayanti111@gmail.com, [2]anggialifyaj16@gmail.com, [3]mukhtar.lutfi64@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Islamic Economics; Seljuk Dynasty; Nizam al-Mulk; Al-Ghazali.

Cara Sitasi:

Penulis, Rizka Damayanti. "Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Bani Saljuk." Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 05, Nomor 01 November 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sosial ekonomi Daulah Bani Saljuk, pemikiran ekonomi Nizam al-Mulk dan Imam al-Ghazali, serta relevansinya terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan historis dan konseptual. Data diperoleh dari sumber primer berupa karya pemikiran tokoh dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Daulah Bani Saljuk berkaitan erat dengan stabilitas pemerintahan, pengelolaan sumber daya, perpajakan, pertanian, dan perdagangan. Pemikiran Nizam al-Mulk menekankan keadilan pemerintahan, tata kelola administrasi, pengawasan, dan tanggung jawab penguasa dalam pengelolaan negara. Sementara itu, Imam al-Ghazali menekankan etika ekonomi, moralitas, kemaslahatan (*maslahah*), dan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) dalam aktivitas ekonomi. Kedua pemikiran tersebut saling melengkapi dalam membangun perspektif ekonomi Islam yang mengintegrasikan kekuatan kelembagaan dengan tanggung jawab moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Daulah Bani Saljuk memiliki relevansi konseptual bagi ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam penguatan tata kelola kelembagaan, keadilan distribusi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.

This study aims to analyze the socioeconomic development of the Seljuk Dynasty, the economic thought of Nizam al-Mulk and Imam al-Ghazali, and its relevance to the development of contemporary Islamic economics. This research employs a qualitative approach using library research with historical and conceptual perspectives. Data were collected from primary sources consisting of the intellectual works of the two scholars and secondary sources, including relevant books, journal articles, and previous studies. The data were analyzed descriptively and analytically through identification, classification, interpretation, and conclusion drawing.

Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

The findings indicate that the economic development of the Seljuk Dynasty was closely associated with political stability, resource management, taxation, agriculture, and trade. Nizam al-Mulk's economic thought emphasizes governmental justice, administrative governance, supervision, and the ruler's responsibility in managing the state. Meanwhile, Imam al-Ghazali emphasizes economic ethics, morality, public welfare (maslahah), and the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah) in economic activities. These two perspectives complement each other in developing an Islamic economic framework that integrates institutional strength with moral responsibility. This study concludes that the economic thought of the Seljuk Dynasty remains conceptually relevant to contemporary Islamic economics, particularly in strengthening institutional governance, distributive justice, accountability, and social welfare.

Pendahuluan

Islam merupakan peradaban yang memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan sistem kehidupan, termasuk dalam bidang politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Perkembangan peradaban Islam tidak terlepas dari dinamika berbagai dinasti yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan institusi pemerintahan dan pemikiran intelektual. Salah satu periode penting dalam sejarah peradaban Islam adalah masa Daulah Saljuk yang berkembang sejak abad ke-11 M. Kemunculan Daulah Saljuk memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika politik dunia Islam, terutama melalui perannya dalam memperkuat kembali otoritas politik dan melindungi kekuasaan Daulah Abbasiyah yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat konflik internal dan tekanan eksternal. Perkembangan tersebut menjadikan Daulah Saljuk sebagai salah satu kekuatan penting dalam menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong kebangkitan peradaban Islam pada abad pertengahan (Tacong & Haeriyah, 2025).

Kebangkitan Daulah Saljuk tidak hanya ditandai oleh keberhasilan politik dan militer, tetapi juga oleh perkembangan kelembagaan pendidikan, administrasi pemerintahan, dan aktivitas ekonomi. Salah satu pencapaian penting pada periode ini adalah pendirian Madrasah Nizamiyyah yang berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam. Keberadaan lembaga tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan peradaban tidak hanya bertumpu pada kekuatan politik, tetapi juga membutuhkan penguatan sumber daya intelektual dan institusi pendidikan. Dalam konteks ini, perkembangan pendidikan turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lahirnya pemikir-pemikir Muslim yang memberikan kontribusi terhadap berbagai bidang keilmuan, termasuk pemikiran ekonomi Islam (Rohmatika & Afrizal, 2025).

Secara historis, perkembangan Daulah Saljuk berkaitan erat dengan perubahan konfigurasi politik di kawasan Transoksania dan persaingan antardinasti, terutama Samaniyah, Karakhanid, dan Ghaznawiyah. Dinamika tersebut mendorong kelompok Saljuk untuk memperkuat posisi politiknya hingga berkembang menjadi kekuatan pemerintahan yang berpengaruh di kawasan Asia Barat. Perkembangan kekuasaan Saljuk selanjutnya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Alp Arslan dan Malik Shah I. Pada periode tersebut, konsolidasi pemerintahan dan perluasan wilayah membutuhkan sistem administrasi yang terorganisasi, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta kebijakan yang mampu menjaga

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan Daulah Saljuk dapat dipahami tidak hanya sebagai proses ekspansi kekuasaan, tetapi juga sebagai pembentukan tata kelola pemerintahan yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan ekonomi (Siradjuddin & Chairunnisa, 2025).

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Saljuk, terdapat dua tokoh penting yang memiliki kontribusi berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu Nizam al-Mulk dan Imam al-Ghazali. Nizam al-Mulk merupakan seorang wazir yang memiliki peran strategis dalam administrasi pemerintahan Saljuk. Melalui karyanya *Siyasatnama*, ia mengemukakan berbagai pandangan mengenai kepemimpinan, keadilan, pengawasan aparatur negara, pengelolaan pemerintahan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pemikirannya menunjukkan bahwa stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, Imam al-Ghazali memberikan kontribusi melalui pendekatan etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Ia menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia untuk mencapai kemaslahatan, dengan menekankan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual serta perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Huda, n.d.).

Pemikiran kedua tokoh tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan, etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Nizam al-Mulk, penyelenggaraan pemerintahan yang adil, pengelolaan penerimaan negara, serta pengawasan terhadap aparatur merupakan bagian penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Adapun pemikiran al-Ghazali menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan berdasarkan nilai moral, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan. Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus perilaku ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah (Manan, 2018).

Meskipun demikian, kajian mengenai Daulah Saljuk tidak cukup hanya ditempatkan dalam kerangka sejarah politik dan perkembangan peradaban. Aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah bagaimana pemikiran ekonomi para tokohnya berhubungan dengan praktik pengelolaan pemerintahan, kebijakan fiskal, pengembangan pertanian, perdagangan, serta distribusi sumber daya ekonomi. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang berkembang pada masa tersebut dapat memberikan perspektif bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Kajian ini menjadi penting karena pemikiran ekonomi Islam klasik tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip normatif yang dapat dianalisis secara kritis sesuai dengan perkembangan sistem ekonomi modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah dan kondisi sosial ekonomi Daulah Saljuk, mengkaji pemikiran ekonomi Islam melalui kontribusi Nizam al-Mulk dan Imam al-Ghazali, serta mengidentifikasi relevansinya terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pemikiran ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat dalam sejarah peradaban Islam. Dengan demikian, kajian terhadap Daulah Saljuk tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan historiografi ekonomi Islam, tetapi juga memperkaya perspektif konseptual mengenai penerapan nilai keadilan, etika, dan kemaslahatan dalam pembangunan ekonomi.

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

Pemikiran Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah

Pemikiran ekonomi Islam merupakan bagian dari perkembangan intelektual Islam yang membahas aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam perkembangannya, pemikiran ekonomi Islam tidak hanya membicarakan persoalan transaksi dan kepemilikan harta, tetapi juga mencakup tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya, menjaga stabilitas ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam perlu dipahami melalui keterkaitan antara kondisi sosial, politik, kelembagaan, dan perkembangan pemikiran para tokoh Muslim.

Pada masa Daulah Saljuk, pemikiran ekonomi Islam berkembang dalam lingkungan pemerintahan yang membutuhkan sistem administrasi, pengelolaan penerimaan negara, pengaturan pertanian, dan perlindungan aktivitas perdagangan. Pemikiran ekonomi pada periode ini belum tersusun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri sebagaimana ekonomi modern, tetapi terintegrasi dalam pembahasan politik pemerintahan, fikih, etika, dan kehidupan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik memiliki karakter multidimensional karena menghubungkan aspek material dengan tanggung jawab moral dan spiritual (Tacong & Haeriyah, 2025).

Pemikiran Ekonomi Nizam al-Mulk

Nizam al-Mulk merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemerintahan Daulah Saljuk. Kedudukannya sebagai wazir pada masa Alp Arslan dan Malik Shah memberikan kesempatan untuk mengembangkan gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang stabil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemikirannya banyak ditemukan dalam karya *Siyasatnama*, yang berisi nasihat mengenai kepemimpinan, administrasi negara, keadilan, pengawasan pejabat, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Dalam perspektif ekonomi, pemikiran Nizam al-Mulk dapat dikaji melalui beberapa prinsip utama. Pertama, keadilan dalam pengelolaan pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan secara adil dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat. Kedua, pengelolaan keuangan negara. Penerimaan negara harus dikelola secara bertanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Ketiga, pengawasan terhadap aparatur negara. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan praktik pemungutan yang merugikan rakyat. Keempat, perlindungan terhadap masyarakat. Stabilitas keamanan dan kepastian pemerintahan merupakan kondisi penting bagi berlangsungnya kegiatan pertanian, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya (Athifa & Ghozali, 2018).

Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa Nizam al-Mulk menempatkan pemerintahan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan, tetapi juga oleh kualitas administrasi, keadilan kebijakan, dan integritas aparatur negara. Dengan demikian, pemikiran Nizam al-Mulk memberikan perspektif mengenai pentingnya hubungan antara tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pemikiran Ekonomi Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Muslim yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam melalui pendekatan etika, moral,

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

dan kemaslahatan. Pemikirannya mengenai ekonomi dapat ditemukan dalam beberapa karya, terutama *Ihya' Ulumuddin*. Al-Ghazali memandang bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban agama dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

Salah satu konsep penting dalam pemikiran al-Ghazali adalah kemaslahatan (*maslahah*) yang berkaitan dengan perlindungan lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut memberikan landasan bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia dan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kepemilikan dan pemanfaatan harta tidak hanya dipandang sebagai hak individu, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dalam penggunaannya (Zahra & Janwari, 2023).

Selain itu, al-Ghazali memberikan perhatian terhadap pentingnya aktivitas produksi, perdagangan, pembagian kerja, dan pertukaran dalam memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk kerja sama yang memungkinkan masyarakat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi secara individual. Namun, seluruh aktivitas tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, pemikiran al-Ghazali menegaskan bahwa etika merupakan unsur mendasar dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan (Fudaili & Rofiah, n.d.).

Kebijakan Ekonomi Daulah Saljuk

Kebijakan ekonomi Daulah Saljuk dapat dipahami melalui hubungan antara pengelolaan sumber daya negara dan kebutuhan masyarakat. Sebagai pemerintahan dengan wilayah kekuasaan yang luas, Daulah Saljuk membutuhkan sistem administrasi dan pengelolaan ekonomi yang mampu mendukung stabilitas politik serta aktivitas sosial masyarakat. Beberapa bidang penting yang menjadi perhatian adalah perpajakan, pertanian, perdagangan, dan pengelolaan tanah.

Dalam bidang fiskal, penerimaan negara memiliki peran penting untuk membiayai administrasi pemerintahan, pertahanan, dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan penerimaan tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Dalam bidang pertanian, pengelolaan tanah dan sumber daya menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan serta mendukung penerimaan negara. Sementara itu, perkembangan perdagangan membutuhkan keamanan jalur distribusi, infrastruktur pendukung, dan stabilitas wilayah.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sistem *iqtha'* yang berkaitan dengan pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya tanah dalam struktur pemerintahan. Sistem tersebut memiliki hubungan dengan pembiayaan dan organisasi militer serta administrasi negara. Oleh karena itu, analisis terhadap sistem *iqtha'* perlu ditempatkan dalam konteks sejarah dan kelembagaan Daulah Saljuk, bukan semata-mata dipahami sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Kajian terhadap kebijakan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan, pengelolaan sumber daya, dan kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam memahami perekonomian Daulah Saljuk (Manan, 2018; Tacong & Haeriyah, 2025).

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Relevansi Pemikiran Ekonomi Daulah Saljuk dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran ekonomi Nizam al-Mulk dan Imam al-Ghazali memiliki nilai konseptual yang dapat dikaji dalam konteks perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Pemikiran Nizam al-Mulk mengenai keadilan, pengawasan aparatur, dan tanggung jawab pemerintah dapat dikaitkan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pengelolaan ekonomi modern, prinsip tersebut tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, integritas kelembagaan, dan pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, pemikiran al-Ghazali mengenai etika ekonomi dan kemaslahatan memberikan landasan moral bagi pengembangan aktivitas ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial. Prinsip tersebut relevan dengan pengembangan keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta praktik bisnis syariah yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam transaksi (Sholatiah, 2024; Zahra & Janwari, 2023).

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, relevansi pemikiran ekonomi Daulah Saljuk dapat dipahami melalui integrasi antara tata kelola pemerintahan yang adil dan perilaku ekonomi yang berlandaskan etika syariah. Meskipun konteks kelembagaan dan kondisi ekonomi kontemporer berbeda dengan masa Saljuk, prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan tetap dapat menjadi landasan normatif dalam pengembangan ekonomi Islam.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa perkembangan ekonomi Daulah Saljuk tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pemikiran tokoh, kebijakan pemerintahan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nizam al-Mulk memberikan perspektif mengenai tata kelola pemerintahan, keadilan administratif, dan pengelolaan sumber daya negara. Sementara itu, Imam al-Ghazali memberikan landasan etis dan normatif melalui konsep kemaslahatan, moralitas ekonomi, dan tujuan syariah.

Kedua pemikiran tersebut selanjutnya dianalisis bersama dengan kebijakan ekonomi Daulah Saljuk dalam bidang fiskal, pertanian, perdagangan, dan pengelolaan tanah. Hasil analisis diarahkan untuk memahami kontribusi pemikiran ekonomi pada masa Saljuk serta relevansinya bagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian menempatkan keadilan pemerintahan dan etika ekonomi sebagai dua landasan yang saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Saljuk melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sejarah pemerintahan, kebijakan ekonomi, serta pemikiran tokoh-tokoh Muslim. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena berdasarkan konteks historis, sosial, dan intelektual yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian kepustakaan, data diperoleh melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian (Zed, 2014).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan Daulah Saljuk, khususnya kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada masa pemerintahan Alp Arslan dan Malik Shah I. Pendekatan ini juga

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

digunakan untuk memahami latar belakang munculnya pemikiran ekonomi serta hubungan antara kebijakan pemerintahan dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan ekonomi Nizam al-Mulk dan Imam al-Ghazali, terutama mengenai keadilan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara, etika ekonomi, kemaslahatan, dan tujuan syariah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer mencakup karya-karya tokoh yang menjadi objek kajian, terutama *Siyasatnama* karya Nizam al-Mulk dan *Ihya' Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali. Kedua karya tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pemikiran mengenai tata kelola pemerintahan, keadilan, aktivitas ekonomi, moralitas, dan kemaslahatan. Adapun data sekunder diperoleh dari buku sejarah peradaban Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik lainnya yang membahas sejarah Daulah Saljuk dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Penggunaan kedua jenis sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta membandingkan pemikiran normatif para tokoh dengan konteks sejarah pemerintahan pada masanya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan mengidentifikasi, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mencatat informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang terkumpul dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu sejarah dan kondisi sosial ekonomi Daulah Saljuk, pemikiran ekonomi Nizam al-Mulk, pemikiran ekonomi Imam al-Ghazali, kebijakan ekonomi pemerintahan Saljuk, serta relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik terhadap perkembangan ekonomi kontemporer. Penyeleksian sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi pembahasan, kredibilitas penulis atau penerbit, serta kesesuaian informasi dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara deskriptif-analitis. Analisis dilaksanakan melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan memusatkan perhatian pada informasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu mengorganisasikan informasi berdasarkan tema dan keterkaitan antara pemikiran tokoh, kebijakan ekonomi, serta kondisi sosial historis Daulah Saljuk. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil analisis untuk menemukan prinsip-prinsip utama pemikiran ekonomi Islam dan relevansinya bagi perkembangan ekonomi kontemporer. Tahapan analisis tersebut mengacu pada model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur, baik sumber primer maupun sekunder. Informasi mengenai pemikiran Nizam al-Mulk dan Imam al-Ghazali diperiksa dengan merujuk pada karya asli atau terjemahan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian akademik yang relevan. Selain itu, fakta historis mengenai kebijakan ekonomi Daulah Saljuk dibedakan dari interpretasi pemikiran ekonomi para tokohnya. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki landasan argumentasi yang konsisten, menghindari kesalahan interpretasi sejarah, dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan sumber data yang digunakan.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Saljuk,

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

kontribusi Nizam al-Mulk dan Imam al-Ghazali, serta relevansi prinsip keadilan, etika, dan kemaslahatan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

Hasil Penelitian

Sejarah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Daulah Saljuk

1. Sejarah Daulah Saljuk

Daulah Saljuk merupakan salah satu dinasti besar yang berkembang dalam sejarah Islam pada abad pertengahan. Dinasti ini berasal dari kelompok Turki Oghuz dan kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang menguasai wilayah yang luas di dunia Islam. Perkembangan Saljuk tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang politik dan militer, tetapi juga dalam bidang administrasi, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pemerintahan Saljuk ini dikenal dengan nama al-Salajiqah al-Kubra (Saljuk Raya). Pada masa pemerintahan Alp Arselan, ia mencoba melakukan konsolidasi dan ekspansi wilayah kekuatan politik Saljuk (Khisan et al., 2024).

Penaklukan wilayah-wilayah tersebut membawa mereka kepada hubungan yang dekat dengan peradaban-peradaban besar dunia. Dan salah satu wujud dari peradaban tersebut adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya (Saefudin, 1996).

Kekuasaan Saljuk semakin berkembang setelah kemenangan Alp Arslan dalam Pertempuran Manzikert pada 1071. Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Malik Shah. Pada masa Malik Shah, wilayah kekuasaan Saljuk mencapai salah satu puncak perkembangannya. Kekuasaan yang luas tersebut membuat pemerintahan membutuhkan sistem administrasi yang kuat untuk mengatur berbagai wilayah dan kelompok Masyarakat (Frida Rohmatika,Afrizal, 2025).

Penerus Alp Arslan, Malik Shah I (1072–1092 M), membawa Seljuk pada puncak kejayaan politik, ekonomi, dan budaya. Wilayah kekuasaannya membentang luas dari Asia Tengah, Persia, Irak, Suriah, hingga sebagian besar Anatolia. Di bawah kepemimpinan Malik Shah, stabilitas politik relatif terjaga, salah satunya berkat peran wazir Nizam al-Mulk, seorang administrator ulung yang membangun sistem pemerintahan yang efisien dan terstruktur (Sujana, 2025).

Salah satu tokoh yang mempunyai peranan besar dalam penguatan pemerintahan Saljuk adalah Nizam al-Mulk. Ia menjabat sebagai wazir selama pemerintahan Alp Arslan dan Malik Shah. Masa pengabdiannya dalam pemerintahan berlangsung dalam waktu yang panjang dan memberikan pengaruh besar terhadap sistem administrasi Saljuk. Kajian akademik mengenai Nizam al-Mulk mencatat bahwa ia menjabat sebagai wazir selama 29 tahun dan memberikan kontribusi terhadap struktur administratif serta ekonomi pemerintahan Saljuk .

Nizam al-Mulk kemudian dikenal melalui karya *Siyasatnama*. Karya tersebut memberikan berbagai nasihat kepada penguasa mengenai bagaimana negara seharusnya dikelola. Isinya tidak hanya berkaitan dengan urusan politik, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, *Siyasatnama* menjadi salah satu sumber penting dalam memahami pemikiran Nizam al-Mulk.

Selain Nizam al-Mulk, Imam al-Ghazali yang hidup pada masa Saljuk juga memberikan pemikiran yang berkaitan dengan ekonomi. Ia menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus memperhatikan etika, kemaslahatan, dan tujuan syariah (maqashid syariah). Artinya,

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain (Tacong & Haeriyah, 2025).

Nizam al-Mulk menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan keadilan, amanah, dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, ia memberikan perhatian terhadap sistem perpajakan, pengelolaan pemerintahan, pemberian upah yang layak, serta pengawasan terhadap aparat agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Ghozali et al., 2018).

2. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Daulah Saljuk

Kehidupan ekonomi pada masa Daulah Saljuk sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan luasnya wilayah kekuasaan. Kesultanan Saljuq segera menjadi suatu negara yang tertata secara hirarkis, berpolakan Perso-Islami, dengan sultannya yang didukung oleh suatu birokrasi Persia. Tentaranya multinasional yang diatur oleh para panglima budak Turki, dan inti (nucleus) militernya dilengkapi dengan pasukan kesukuan yang berada di bawah para pemimpin Turkmen (MUNDZIRIN, n.d.).

Pertanian menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama masyarakat. Hasil pertanian tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan negara. Perdagangan juga memiliki posisi penting. Wilayah kekuasaan Saljuk berada pada kawasan yang menghubungkan berbagai wilayah perdagangan di Asia Barat. Kota-kota besar menjadi pusat kegiatan ekonomi, pertukaran barang, dan aktivitas masyarakat. Keamanan jalur perdagangan menjadi salah satu perhatian pemerintahan karena perdagangan membutuhkan kondisi yang aman dan stabil.

Hubungan antara keamanan dan ekonomi menjadi sangat penting. Ketika masyarakat mendapatkan keamanan, kegiatan produksi dan perdagangan dapat berlangsung lebih baik. Sebaliknya, konflik dan ketidakamanan dapat menghambat aktivitas ekonomi. Encyclopaedia Iranica menjelaskan bahwa keamanan merupakan kebutuhan dasar bagi pertanian dan perdagangan dalam perekonomian wilayah Saljuk.

Pemerintah juga membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai administrasi, pertahanan, dan berbagai kebutuhan negara. Karena itu, sistem perpajakan dan pengelolaan pendapatan menjadi bagian penting dari administrasi pemerintahan. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana penerimaan negara dapat dikumpulkan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Daulah Saljuk memiliki hubungan yang erat dengan pemerintahan. Negara membutuhkan penerimaan dari kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat membutuhkan perlindungan dan keamanan dari negara. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran ekonomi yang berkembang pada masa tersebut (Sufiani Zahraa, Mukhtar Lutfi, 2025).

Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Saljuk

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Saljuk tidak berkembang dalam bentuk satu teori ekonomi yang sistematis seperti ilmu ekonomi modern. Pemikiran ekonomi pada periode tersebut lebih banyak ditemukan dalam karya-karya mengenai pemerintahan, hukum Islam, etika, politik, dan administrasi negara (Putra Alvino Pramana, 2024).

Beberapa prinsip yang dapat ditemukan dalam pemikiran tersebut antara lain keadilan ekonomi, tanggung jawab pemerintah, perlindungan terhadap masyarakat, pengelolaan pendapatan negara, keamanan perdagangan, pengawasan pejabat, dan pembangunan fasilitas umum.

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Daulah Saljuk, yang muncul sebagai kekuatan dominan pada abad ke-11 hingga 13 M, tidak hanya dikenal sebagai entitas politik dan militer yang kuat, tetapi juga sebagai kekhalifahan yang berhasil mengembangkan sistem ekonomi yang terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, Saljuk memainkan peran penting dalam mentransformasikan tata kelola ekonomi yang bersifat lokal menjadi sistem yang lebih luas, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan umat (Tacong & Haeriyah, 2025).

Kebijakan ekonomi Bani Saljuk menunjukkan bahwa mereka mengadopsi pendekatan yang terintegrasi untuk mengelola sumber daya dan memfasilitasi perdagangan. Pemerintahan Bani Saljuk menerapkan sistem pajak yang terorganisir serta kebijakan agraria yang mendukung pertanian. Melalui teknik irigasi yang lebih baik dan pengelolaan lahan yang efisien, mereka berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan. Hasil ini tidak hanya menjamin ketersediaan makanan bagi populasi yang terus berkembang, tetapi juga menciptakan surplus yang dapat diperdagangkan. Ketersediaan pangan yang stabil berkontribusi pada pertumbuhan pasar lokal, yang menjadi pusat interaksi antara pedagang dan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang proaktif berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan dinamika ekonomi lokal (Sufiani Zahraa, Mukhtar Lutfib, 2025).

Bani Saljuk tidak hanya membangun ekonomi yang kuat tetapi juga meninggalkan warisan yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mereka menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pertumbuhan perdagangan global, dengan menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara lain. Dengan memahami kompleksitas dan dinamika ekonomi pada masa mereka, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana faktor- faktor sosial, politik, dan budaya saling berinteraksi untuk membentuk sebuah peradaban (Nazwa Rabiatun Adawiyah, n.d.).

Salah satu keunggulan utama Daulah Saljuk dalam sektor ekonomi terletak pada posisi geografis strategis yang dimilikinya. Wilayah kekuasaan mereka membentang dari Asia Tengah hingga Asia Kecil, yang mencakup sebagian besar jalur perdagangan utama dunia saat itu, termasuk Jalur Sutra yang menghubungkan dunia Timur dan Barat. Posisi ini menjadikan wilayah Saljuk sebagai titik temu perdagangan internasional, di mana berbagai komoditas seperti sutra dari Tiongkok, rempah- rempah dari India, logam mulia dari Eropa Timur, hingga barang-barang kerajinan dari dunia Islam dipertukarkan secara aktif. Perdagangan lintas wilayah ini tidak hanya memperkuat basis ekonomi domestik, tetapi juga menciptakan keterhubungan budaya dan peradaban yang lebih luas.

Untuk mendukung aktivitas perdagangan yang intensif ini, pemerintahan Saljuk membangun berbagai infrastruktur ekonomi yang vital. Salah satu inovasi terpenting adalah pembangunan caravanserai, yaitu tempat peristirahatan yang dibangun di sepanjang rute perdagangan utama. Caravanserai ini dirancang untuk memberikan perlindungan, makanan, dan tempat istirahat bagi para pedagang dan karavan yang menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir atau pegunungan. Fungsi caravanserai bukan sekadar fisik, tetapi juga strategis, karena keberadaannya menciptakan rasa aman dan stabilitas yang menjadi prasyarat mutlak dalam perdagangan antarwilayah. Dengan keberadaan caravanserai, transaksi komersial dapat berlangsung secara lebih efisien dan terjamin keamanannya, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi kawasan Saljuk.

Selain aspek perdagangan, Daulah Saljuk juga menunjukkan kemajuan dalam kebijakan fiskal dan perpajakan. Sistem perpajakan yang diterapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

keadilan dalam Islam. Dua jenis pajak utama yang diberlakukan adalah kharaj dan ushr. Kharaj merupakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non- Muslim, sedangkan ushr dikenakan terhadap hasil pertanian yang dimiliki oleh umat Islam. Kedua pajak ini dipungut dengan adil dan proporsional, tanpa menimbulkan beban yang berlebihan terhadap rakyat. Bahkan tercatat bahwa Sultan Alp Arslan, salah satu penguasa Saljuk yang termasyhur, menolak segala bentuk pajak tambahan yang tidak mendesak, demi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Daulah Saljuk terhadap prinsip keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat kecil.

Dalam bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam, Daulah Saljuk juga menerapkan sistem kepemilikan tanah yang disebut iqthâ'. Sistem ini merupakan pemberian hak pengelolaan atas tanah kepada pejabat sipil atau militer sebagai bentuk imbalan atas jasa dan loyalitas mereka kepada negara. Namun, penting dicatat bahwa sistem iqthâ' bukanlah sistem kepemilikan mutlak. Hak atas tanah ini bersifat sementara, tidak dapat diwariskan atau diperjualbelikan. Pemegang hak hanya berfungsi sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk mengelola tanah demi kepentingan publik, seperti produksi pertanian dan pembiayaan militer. Sistem ini tidak hanya menciptakan efisiensi dalam pemanfaatan tanah negara, tetapi juga mencegah terjadinya monopoli dan penguasaan tanah oleh segelintir elite, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam.

Selain itu ada juga Kebijakan yang diberlakukan oleh Dinasti Saljuk antara lain ada di bidang ketatanegaraan, social-ekonomi, dan bidang spiritual. Misalnya petani menggarap lahan, namun ia hanya mengambil bagian secukupnya untuk dikonsumsi. Pemerintah juga memberi kewajiban seseorang untuk memantau timar yang diwajibkan menyetorkan harta benda atau 2 hingga 4 ekor kuda, dan juga beberapa pelaut yang harus mau ditugaskan dan memiliki kewajiban menjadi Angkatan Laut (Ghozali et al., 2018).

Dengan demikian, sistem ekonomi yang dijalankan oleh Daulah Saljuk menunjukkan kematangan dalam aspek kelembagaan dan moral. Penerapan prinsip- prinsip syariah dalam perdagangan, perpajakan, dan distribusi sumber daya menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya retorika normatif, tetapi telah nyata diimplementasikan dalam bentuk kebijakan konkret pada masa lampau. Keberhasilan Saljuk dalam mengelola ekonomi tidak terlepas dari kombinasi antara visi politik yang stabil, orientasi religius yang kuat, dan kecerdasan dalam membaca dinamika pasar internasional. Inilah yang membuat Daulah Saljuk layak dikenang bukan hanya sebagai pelindung peradaban, tetapi juga sebagai pelopor tata ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Nazwa Rabiatun Adawiyah, n.d.).

Relevansi Pemikiran Ekonomi Daulah Saljuk bagi Perkembangan Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi pada masa Daulah Saljuk masih memiliki relevansi dengan perkembangan ekonomi Islam saat ini, terutama dalam hal keadilan, etika, dan tanggung jawab dalam mengelola ekonomi.Pemikiran Nizam al-Mulk mengenai pemerintahan yang adil, pengelolaan pajak, pengawasan aparat, dan pemberian upah yang layak dapat menjadi bahan pembelajaran dalam membangun tata kelola ekonomi yang baik. Sementara itu, pemikiran al-Ghazali mengenai kemaslahatan dan etika menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan Masyarakat (Ghozali et al., 2018).

Relevansi tersebut dapat dilihat dalam ekonomi Islam modern, misalnya dalam pentingnya keadilan dalam transaksi, pengelolaan keuangan yang amanah, perlindungan terhadap masyarakat, serta kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat sosial. Penelitian mengenai pemikiran Nizam al-Mulk juga menunjukkan bahwa gagasannya masih dapat dikaji

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, meskipun penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan sistem ekonomi masa kini (Sholatiah, 2024).

Jadi, pemikiran ekonomi Daulah Saljuk tidak harus diterapkan secara sama seperti pada masa lalu. Nilai-nilai dasarnya, seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, dan pengelolaan ekonomi yang baik, yang dapat menjadi pelajaran bagi perkembangan ekonomi Islam saat ini.

Pemikiran ekonomi Daulah Saljuk juga menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Nizam al-Mulk memandang bahwa stabilitas negara berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menjaga kehidupan rakyat. Sementara itu, Al-Ghazali menempatkan kemaslahatan sebagai dasar penting dalam aktivitas ekonomi (Zahra & Janwari, 2023).

Dalam pemikiran Al-Ghazali, kemaslahatan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan pokok (dharuriyyat), kebutuhan pelengkap (hajiyyat), dan kebutuhan penyempurna (tahsiniyyat). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas kehidupan manusia.

Dalam perkembangan ekonomi Islam sekarang, prinsip tersebut relevan dengan pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan instrumen sosial Islam diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat solidaritas sosial (Fudaili & Rofiah, n.d.).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Daulah Bani Saljuk memiliki peran penting dalam perkembangan pemikiran dan praktik ekonomi Islam, terutama melalui pengelolaan pemerintahan, sumber daya, pertanian, dan perdagangan. Stabilitas politik dan penguatan administrasi menjadi faktor pendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pengelolaan penerimaan negara, sistem pertanahan, serta perdagangan menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa Saljuk memiliki keterkaitan erat dengan kapasitas pemerintahan dalam mengatur sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemikiran ekonomi Nizam al-Mulk menekankan pentingnya keadilan, tata kelola pemerintahan, pengawasan administrasi, dan tanggung jawab penguasa dalam mengelola negara. Sementara itu, Imam al-Ghazali menempatkan etika, moralitas, *maslahah*, dan *maqashid al-syariah* sebagai landasan aktivitas ekonomi. Kedua pemikiran tersebut memiliki orientasi yang saling melengkapi. Nizam al-Mulk memberikan penekanan pada aspek kelembagaan dan kebijakan pemerintahan, sedangkan al-Ghazali menegaskan pentingnya dimensi moral dan tujuan syariat dalam perilaku ekonomi.

Relevansi pemikiran ekonomi Daulah Saljuk bagi ekonomi Islam kontemporer terletak pada pentingnya integrasi antara tata kelola kelembagaan dan etika ekonomi. Prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat tetap relevan dalam pengembangan ekonomi Islam saat ini. Dengan demikian, pemikiran Nizam al-Mulk dan Imam al-Ghazali memberikan landasan konseptual bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan keadilan distribusi, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan mempertemukan perspektif tata kelola pemerintahan Nizam al-Mulk dan perspektif etika ekonomi Imam al-Ghazali dalam memahami perkembangan ekonomi Islam pada masa Daulah Saljuk. Namun, penelitian ini

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan belum menguji secara empiris penerapan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif antara pemikiran ekonomi Daulah Saljuk dan praktik ekonomi Islam modern, khususnya dalam bidang kebijakan fiskal, tata kelola lembaga keuangan syariah, dan distribusi kesejahteraan.

Daftar Pustaka

'Athifa, R. D., & Ghozali, M. (2018). Pemikiran Nizam al-Mulk (1018 M–1092 M) dalam ekonomi Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 18*(1), 85–93. https://doi.org/10.32939/islamika.v18i01.233

Fudaili, M., & Rofiah, K. (2023). Relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam di Indonesia. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, 5*(2). https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6927

Huda, M. N. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Sciences and Humanities, 1*(2), 135–148. https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466

Manan, N. H. A. (2018). Dinasti Saljuk dalam sejarah peradaban Islam. *Jurnal Adabiya, 20*(2), 13–20. https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i2.7432

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nizam al-Mulk. (Tahun sesuai edisi yang digunakan). *Siyasatnama* (*Siyar al-Muluk*). [Lengkapi nama penerjemah, penerbit, dan tahun berdasarkan edisi yang digunakan].

Al-Ghazali, A. H. (Tahun sesuai edisi yang digunakan). *Ihya' 'Ulum al-Din*. [Lengkapi kota penerbit dan nama penerbit berdasarkan edisi yang digunakan].

Rohmatika, F., & Afrizal, S. (2025). Dinasti Bani Saljuk dalam sejarah peradaban Islam. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11*(2), 250–261. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6948

Sholatiah. (2024). Study of Nizam Al-Mulk's thought and its relevance in contemporary Islamic economic. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 15*(1), 18–32. https://doi.org/10.18592/taradhi.v15i1.12716

Siradjuddin, & Chairunnisa. (2025). Rekonstruksi budaya konsumsi: Kajian kritis perspektif Al-Ghazali di masa Dinasti Saljuk dalam implementasi kebijakan ekonomi. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, 10*(1), 1–10. https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i1.6343

Tacong, H., & Haeriyah, H. (2025). Kontribusi pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Saljuk: Telaah terhadap Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali. *JSE: Jurnal Sharia Economica, 4*(3), 123–138. https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2139

Zahra, S., & Janwari, Y. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4*(2), 87–96. https://ojs.ikopin.ac.id/ecoiqtishodi/article/view/284

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.